

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah, seperti hutan, tambang, air, tanah, laut, dan lain-lain. Namun pengelolaannya kurang maksimal, sehingga tidak semua masyarakat bisa menikmati hasil kekayaan alam tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia juga masih ada kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Selain itu juga pembangunan yang tidak merata di kota dengan di desa. Fasilitas umum di desa belum mencukupi, jarak yang jauh dari tempat tinggal penduduk, dan lain-lain sehingga ada yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pada dasarnya, fasilitas umum di desa adalah infrastruktur yang penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Misalnya seperti 4 fasilitas yaitu sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, dan sarana keamanan. Sarana kesehatan seperti apotek dan puskesmas; sarana pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan; sarana transportasi seperti jalan yang terawat dan angkutan umum; dan sarana keamanan seperti kantor polisi dan penjaga lingkungan.

Pemerintah desa dan beberapa pihak yang terkait harus menyediakan fasilitas umum di desa, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat desa agar lebih baik. Fasilitas umum yang layak di suatu desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Fasilitas umum yang memadai dapat mendorong aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa serta memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, masyarakat desa dapat mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Selain itu, fasilitas umum yang memadai juga dapat memperkuat perekonomian desa. Masyarakat desa dapat melakukan usaha jika

mereka memiliki akses yang memadai, termasuk jalan yang memadai. Hal ini meningkatkan daya saing masyarakat desa dalam menjual produk lokal di pasar regional dan nasional.

Terkait dengan pembangunan fasilitas umum di desa, desa di Indonesia dapat bertahan dan berkembang apabila memiliki fasilitas umum yang memadai dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Pembangunan fasilitas umum di desa harus berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam waktu jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan fasilitas umum di desa membutuhkan berbagai sumber daya, baik itu pendanaan, sumber daya manusia, material, dan bantuan teknis.

Dalam membangun fasilitas umum di suatu desa, modal merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting. Pemerintah, badan amal, dan lembaga-lembaga lainnya dapat memberikan dukungan dan pendanaan untuk pembangunan fasilitas umum di desa. Pembangunan fasilitas umum desa juga membutuhkan tenaga kerja dan material untuk hasil yang maksimal.

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas umum di desa. Pemerintah harus menyediakan sumber daya seperti uang, sumber daya manusia, dan bantuan teknis lainnya untuk dapat membangun fasilitas umum di desa. Pemerintah juga perlu mengambil kebijakan yang mendukung pengembang dalam membangun fasilitas umum di daerah pedesaan.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembangunan fasilitas umum di desa, namun hal ini tidak dilaksanakan secara efektif. Masyarakat dapat membantu dengan menyediakan tenaga kerja, penyediaan material, dan penggalangan dana untuk membangun fasilitas umum di desa mereka. Selain itu, pemerintah kota juga dapat membangun fasilitas umum untuk digunakan warga desa seperti jalan, taman, dan masjid. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas umum di desa merupakan aspek yang penting dalam membangun desa agar lebih baik dan maju. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat luas.

Fasilitas umum juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Tanpa fasilitas umum yang memadai, banyak aktivitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan transportasi akan terdampak. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas umum harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, olahraga, dan rekreasi.

Fasilitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium perlu dioptimalkan. Fasilitas kesehatan seperti air bersih dan sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit berbahaya. Fasilitas ekonomi seperti bank dan koperasi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat desa. Fasilitas transportasi seperti angkutan umum, stasiun kereta api, halte, dan terminal untuk menghubungkan desa dengan kota dan daerah lainnya. Fasilitas olahraga dan rekreasi seperti lapangan olahraga, sanggar kebugaran, taman, dan tempat wisata untuk membantu menjaga kesehatan, mencari kegiatan rekreasi, dan hiburan.

Dengan adanya beberapa fasilitas umum yang telah disebutkan tersebut, kehidupan sehari-hari masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Maka dari itu, pemimpin di desa tersebut harus lebih mengutamakan penyediaan fasilitas umum dalam visi dan misi untuk pembangunan desa. Masyarakat desa juga harus mempersiapkan dalam menghadapi perubahan di masa depan dengan menuntut hak mereka atas fasilitas umum yang memadai.

Fasilitas umum adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dan tidak memandang status mereka. Dulu, fasilitas umum di desa dibangun berdasarkan pada anggaran dan kualitasnya kurang memadai. Tetapi berkat inovasi teknologi yang ada, dengan tersedianya fasilitas umum di desa jadi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Kini, teknologi yang ada berhasil dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas umum di desa seperti jalan, jembatan, listrik, dan irigasi. Teknologi yang digunakan seperti drone, sistem penginderaan jarak jauh, sistem informasi geografis (SIG). Penerapan teknologi ini antara lain penggunaan drone untuk memantau lokasi konstruksi sekaligus mengumpulkan data tentang desa-desa menggunakan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG). Ini memungkinkan

untuk merencanakan dan memprioritaskan fasilitas umum di desa yang perlu dibangun lebih dahulu dan harus memadai.

Ada beberapa manfaat dari pemanfaatan teknologi dalam pembangunan fasilitas umum di desa. Pertama, teknologi dapat digunakan dalam mempercepat proses pembangunan. Dengan menggunakan teknologi, kita dapat melakukan tugas-tugas seperti penelitian, memahami kebutuhan, merancang, dan memantau dengan lebih efisien dan lebih akurat. Kedua, penggunaan teknologi mengurangi kesalahan pada penggunaan bahan konstruksi, sehingga menghasilkan umur bangunan yang lebih panjang dan efisiensi. Ketiga, teknologi juga dapat memungkinkan pemerintah lebih menghemat anggaran untuk pembangunan.

Teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi pembangunan fasilitas umum di desa, tetapi masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Tantangan-tantangan ini mencakup permasalahan teknis seperti rendahnya kemampuan teknologi masyarakat. Biaya pada penggunaan teknologi juga terbilang cukup tinggi, dan kurangnya dukungan serta kerja sama dari pemerintah daerah dan masyarakat desa yang dikatakan sebagai penghambat dalam penggunaan teknologi.

Pemanfaatan teknologi dalam hal pembangunan fasilitas umum di desa adalah langkah yang tepat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan desa. Walaupun terdapat tantangan dalam mengimplementasikan teknologi, masyarakat dan pemerintah perlu untuk meningkatkan kesadaran bahwa betapa pentingnya teknologi dalam pengembangan fasilitas umum desa dan bersiap untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan juga SDM pada bidang teknologi.

Fasilitas umum sendiri adalah fasilitas untuk akses masyarakat dan pelayanan publik. Banyak fasilitas umum yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah desa agar memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat desa. Tetapi, keinginan masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas umum di desa perlu ditingkatkan lagi.

Masyarakat memegang peran penting dalam pemanfaatan fasilitas umum di desa. Masyarakat perlu memahami dan menghargai terkait dengan pentingnya

fasilitas umum. Selain itu, masyarakat harus menjaga dan mengelola fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa agar selalu pada kondisi yang baik dan dapat digunakan setiap saat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pemanfaatan fasilitas umum di desa. Masyarakat juga perlu untuk memahami dan menghargai pentingnya fasilitas umum. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menjaga dan mengelola fasilitas umum agar tetap dalam kondisi yang baik, sehingga dapat digunakan kapanpun. Peran masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas umum yaitu penggunaan yang bijaksana, partisipasi dalam pengawasan, dan edukasi dan sosialisasi.

Sementara peran pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas umum yaitu melakukan perencanaan pembangunan fasilitas umum, memastikan fasilitas dibangun dengan kualitas baik, pemeliharaan rutin dan perbaikan, pengelolaan anggaran, mengadakan program edukasi pendidikan dan sosialisasi kampanye, dan bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga non pemerintah (Panda, 2023).

Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah adalah kunci untuk memastikan fasilitas umum berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Masyarakat harus menyadari peran mereka dalam menjaga dan merawat fasilitas tersebut, sementara pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas dibangun, dikelola, dan dipelihara dengan baik. Dengan kerja sama yang baik antara keduanya, fasilitas umum akan tetap menjadi aset berharga yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat desa.

Berdasarkan Data Kependudukan tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah 272.229.372 jiwa, tahun 2022 sejumlah 275.344.166 jiwa, dan pada 30 April tahun 2023 sejumlah 277.749.853 jiwa (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 sebesar 26,50 juta orang.

Jumlah ini terdiri dari : jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 11,86 juta orang dan penduduk miskin pedesaan sebesar 14,64 juta orang. Garis kemiskinan pada bulan September 2021 adalah sebesar Rp486.168 per kapita per

bulan. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 adalah sebesar 26,36 juta orang dan persentasenya sebesar 9,75%. Sementara garis kemiskinan pada bulan September 2022 sebesar Rp535.547 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, dengan dilaksanakannya program-program diantaranya adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin).

Dengan adanya program-program tersebut, ternyata belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan di Indonesia dan membutuhkan pendekatan yang beragam. Banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk membantu masyarakat lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, yaitu dengan adanya lembaga-lembaga sosial seperti agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Selain kemiskinan, kekurangan air bersih juga menjadi permasalahan bagi penduduk Indonesia. Air bersih yang tersedia belum dapat merata di seluruh daerah dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Persediaan air untuk manusia adalah 97,5% dan yang lainnya untuk tempat hidup mereka. Dari total jumlah persen itu, hanya 2,5% air yang berkualitas untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Jumlah air bersih yang tersedia itupun sangat terbatas, serta faktor-faktor yang lain dapat menyebabkan air bersih yang tersedia menjadi menipis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi krisis air bersih, yaitu menghemat air saat digunakan, tidak membuang sampah di tempat saluran air, menanam pohon atau melakukan reboisasi, dan membuat tempat untuk menampung air hujan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, 2022).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2017, ada 2 miliar orang di dunia yang hidup tanpa adanya akses air bersih. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2019, ada 2,2 miliar orang di dunia

yang kurang air minum dan aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan pada hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) pada tahun 2020, sejumlah 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia telah mengonsumsi air minum yang sudah tercampur dengan bakteri *Escherichia coli* (E-coli). Akses air minum yang layak telah mencapai 93%, dan akses air minum yang aman hanya mencapai 11,9%. Sementara menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Proyeksi Ketersediaan Air, bahwa ketersediaan pada air per kapitanya di Indonesia yang diprediksi pada tahun 2035 hanya tersisa 181.498 meter kubik (Indonesiabaik, 2022).

Indonesia tidak dapat terlepas dari permasalahan krisis air bersih, meskipun memiliki ribuan sungai dan air tanah. Maka diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis air bersih ini, seperti memperbaiki aspek pengelolaannya atau disebut manajemen air. Menurut Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), seharusnya Indonesia tidak berada dalam kondisi yang kekurangan air. Wilayah di Indonesia dimulai dari Jawa Timur sampai NTT memiliki potensi yang besar dalam mengalami krisis air, akan bertambah tinggi dengan dampak perubahan iklim yang meningkat, dan pengelolaan air yang tidak tepat.

USAID juga mengatakan pengelolaan air di Indonesia yang buruk terjadi akibat banyaknya pihak yang bertanggung jawab pada masalah air, tetapi pihak-pihak tersebut terbilang lemah pada aspek koordinasi dan pemahaman yang rendah akan pengelolaan air. Dalam hal ini, diperlukan peran pemerintah agar dapat memenuhi data-data akan potensi krisis air di wilayah-wilayah yang ada, serta adanya dukungan media dan informasi lainnya mengenai krisis air (Kompas, 2023).

Indonesia sebenarnya memiliki sumber air yang banyak. Hal ini dilihat dari potensi yang dimiliki, yaitu didukung oleh adanya 5.700 sungai dan 421 cekungan air tanah. Jadi, aspek alam bukanlah satu-satunya yang menyebabkan krisis air bersih. Namun, ada penyebab lain yaitu pengelolaan air yang kurang baik. Pihak yang bertanggung untuk masalah air terlalu banyak, tetapi lemah dalam berkoordinasi (Kompas, 2023).

Saat ini, banyak bermunculan lembaga-lembaga sosial keagamaan atau dikenal juga dengan istilah lembaga filantropi. Tradisi filantropi sudah ada sejak

zaman Yunani dan Romawi Kuno, ketika mereka yang menyumbangkan harta benda yang dimiliki untuk pendidikan dan perpustakaan. Serta di zaman Mesir Kuno yang telah mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh para pemuka agama.

Sejarah Filantropi di Indonesia diawali dari unsur Filantropi Tradisional yang berasal dari agama, baik Islam maupun Kristen. Filantropi keagamaan di Indonesia ini berkaitan dengan kegiatan dakwah dan misionaris. Lalu adanya kegiatan penyebaran agama yang dilakukan seperti penyediaan pelayanan sosial atau kerja sosial terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sejak saat itu, para pelaku filantropi yang berasal dari kalangan anak muda mulai muncul.

Filantropi memiliki sifat yang dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berfokus pada kepedulian terhadap sesama, yang umumnya berupa pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para individu yang suka berderma kepada kaum miskin untuk dapat membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Maka dari itu, filantropi tradisional ini sifatnya lebih kepada individual. Sedangkan filantropi modern lebih sering disebut dengan Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial sebagai bentuk dari kedermawanan sosial yang bermaksud untuk menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin (Tempo, 2021).

Selain itu, terdapat juga filantropi sosial yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dengan memberikan bantuan yang memiliki dampak waktu jangka panjang dan berkelanjutan, respon terhadap adanya realitas sosial, serta menargetkan akar dari persoalan tentang penyebab kemiskinan. Akar persoalan atau permasalahan sosialnya seperti ketimpangan sosial, diskriminasi sosial meliputi adanya perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan kelompok tertentu. Aktivitas ini dibentuk untuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, tanpa memandang adanya perbedaan (Fauzia, *et al.*, 2020).

Lembaga Filantropi Islam contohnya, memiliki berbagai jenis program untuk membantu masyarakat miskin, yaitu melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Salah satu lembaga filantropi yang ada di Tebet, Jakarta Selatan yaitu Badan Wakaf

Al-Qur'an yang dipimpin oleh Bapak Heru Binawan, memiliki berbagai macam program dan proyek untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Badan Wakaf Al-Qur'an menjaring berbagai donatur mulai dari individu, komunitas, mushola / masjid di mal dan perkantoran, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sampai lembaga / perusahaan (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2022).

Masyarakat miskin di Indonesia memiliki berbagai kebutuhan yang mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa kebutuhan tersebut yaitu sandang, pangan, papan, sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, pekerjaan, perlindungan sosial, dan keadilan sosial. Mengatasi berbagai kebutuhan ini secara efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Sementara untuk kebutuhan masyarakat miskin di Desa Sukamulya, Bogor, Jawa Barat adalah sarana air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sarana air bersih untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap solusi yang diimplementasikan. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari (Hasil wawancara penulis dengan Pak Ahmad Saiful sebagai mitra lapang / penduduk Desa Sukamulya, Bogor).

Proyek tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu Badan Wakaf Al-Qur'an dan lembaga-lembaga pendukung. Sebelumnya juga pernah dibantu oleh pemerintah tahun 1997 yaitu pipanisasi yang berasal dari sumber air desa dan dialirkan desa-desa, dapat dipastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Desa Sukamulya, Bogor, Jawa Barat. Namun, air bak tersebut hancur karena terjadi longsor tahun 2018 (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2022).

Justifikasi penelitian ini berdasarkan pada bukti-bukti yang didapatkan oleh penulis dari lokasi penelitian. Mulai dari permasalahan yang ada di lokasi penelitian, proyek yang dijalankan, pengalaman pribadi, dan pengalaman di lokasi penelitian. Justifikasi ini juga mendokumentasikan hal-hal yang diperlukan untuk

meneliti permasalahan tersebut, agar membuktikan kepada pembaca bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan.

Penelitian ini penting karena Badan Wakaf Al-Qur'an adalah lembaga sosial atau istilah lainnya lembaga filantropi Islam yang kegiatannya berkaitan dengan Al-Qur'an, dan mulai berdiri sejak tahun 2005. Badan Wakaf Al-Qur'an ini menggalang dana berdasarkan proyek bukan program tertentu sehingga lebih jelas penyaluran bantuannya dan dapat segera menyalurkan bantuannya terhadap masyarakat miskin untuk jangka waktu yang berbeda-beda, seperti pembangkit listrik (*solar cell*) yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, sarana air bersih, dan kapal dakwah. Penulis memilih Proyek Wakaf Sarana Air Bersih karena air bersih sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, sehingga proyek ini dapat membantu masyarakat dalam penggunaan air bersih.

Penulis memilih lokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat karena Bogor adalah kota hujan, memiliki banyak pegunungan dan banyak sumber mata air, tetapi masih terdapat wilayah yang kekurangan air bersih dan sulit untuk mendapatkannya dikarenakan kendala-kendala yang ada. Selain itu, mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah masyarakat yang tergolong ekonominya rendah atau menengah ke bawah, kondisi ini tentu saja cukup memprihatinkan dan harus segera diatasi agar masyarakat dapat merasakan pemakaian air bersih yang menjadi kebutuhan pokok (Badan Wakaf Al-Qur'an, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an, Jl. Tebet Timur Dalam I No. 1, Tebet, Jakarta Selatan adalah :

Bagaimana peran lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Qur'an dalam membantu penyediaan sarana air bersih pada masyarakat miskin di Desa Sukamulya, Bogor, Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis dapatkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Qur'an dalam membantu penyediaan sarana air bersih pada masyarakat miskin di Desa Sukamulya, Bogor, Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai pembandingan antara teori yang sudah ada yaitu teori filantropi Islam dengan hasil penelitian penulis nanti, apakah sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan tersebut. Sebagai acuan agar hasil penelitian penulis nanti tidak melenceng dari hal-hal yang terdapat di dalam teori, sehingga dapat disesuaikan dengan apa yang telah penulis pelajari tentang teori yang digunakan tersebut. Dapat juga digunakan sebagai referensi oleh pembaca jika ingin mengetahui lebih dalam tentang penelitian terkait peran Badan Wakaf Al-Qur'an dalam membantu masyarakat miskin dan teori yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penelitian ini, menambah pengetahuan mulai dari perlunya sikap peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan, pentingnya Badan Wakaf Al-Qur'an dalam membantu masyarakat miskin, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, sehingga banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat membantu mensejahterahkan masyarakat miskin.

1.5 Batasan Penelitian

Skripsi ini memiliki batasan penelitian yang terdiri dari gender, tahun, lokasi, waktu, variabel, dan informan. Batasan ruang lingkup yang terkait dengan pembahasan pada skripsi ini. Batasan gender berfokus pada 14 karyawan laki-laki dan 13 karyawan perempuan Badan Wakaf Al-Qur'an dengan total 27 karyawan. Bagian Program ada 5 karyawan laki-laki, Bagian *Engineering* ada 4 karyawan laki-laki, Bagian *Marketing* ada 3 karyawan laki-laki, dan Bagian *Fundraising* ada 3 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan, dan Bagian *Telefundraising* ada 10 karyawan perempuan.

Batasan tahun berfokus pada kegiatan pelaksanaan Proyek Wakaf Sarana Air Bersih Desa Sukamulya, Bogor yang dimulai pada bulan September 2022 sampai dengan November 2022. Proyek ini diresmikan pada tanggal 3 Februari 2023. Jadi, proyek ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Batasan waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yaitu pada tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023.

Batasan variabel penelitian ini adalah lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Qur'an, peran lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Qur'an, Proyek Wakaf Sarana Air Bersih, masyarakat miskin, penduduk Desa Sukamulya, Bogor, karyawan Badan Wakaf Al-Qur'an, wakif / donatur. Batasan informan penelitian terdiri dari 4 karyawan, 2 karyawan, 1 wakif / donatur perempuan, 1 mitra lapang sekaligus penduduk laki-laki Desa Sukamulya, Bogor, dan 1 penduduk perempuan Desa Sukamulya, Bogor.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian yang terkait dengan pembahasan pada judul skripsi yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah dari pembahasan di dalam skripsi ini, untuk dapat memahami permasalahan yang terjadi terkait dalam mengentaskan

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin khususnya di Desa Sukamulya, Bogor, Jawa Barat. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan batasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka konsep (peran, lembaga filantropi, masyarakat miskin, dan kemiskinan), kerangka teori (filantropi Islam), dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peran lembaga filantropi Badan Wakaf Al-Qur'an dalam membantu penyediaan sarana air bersih pada masyarakat miskin, khususnya pada proyek Wakaf Sarana Air Bersih Desa Sukamulya, Bogor.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

